

Penguatan Pendidikan Karakter

Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si

Guru Besar FDK UINSU

Kita harus menyambut baik lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dasar pemikiran lahirnya Peraturan tersebut dalam rangka menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti. Bagi umat Islam pertimbangan itu sejalan dengan misi profetik bahwa Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt untuk menyempurnakan akhlak manusia.



Penguatan Pendidikan Karakter dimaksudkan dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai yang positif untuk menjadi bangsa yang unggul dan modern. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Namun Peraturan Presiden sifatnya sebagai penguatan, dan ini berarti nilai-nilai tersebut selama ini masih lemah, maka perlu diperkuat.

Pendidikan Karakter dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama, yaitu keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat. Gerakan Pendidikan Karakter ini berada di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Presiden mengeluarkan Peraturan ini dimaksudkan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Harmonisasi keempat hal di atas dalam konteks Islam disebut dengan karakter *Ulul Albab*. Dalam Alquran surah Ali Imran ayat 190-191 disebutkan bahwa *Ulul Albab* atau intelektual plus adalah mereka yang selalu mensinergikan antara pikir dan zikir, dalam tiga suasana yaitu di saat berdiri, duduk dan berbaring.

Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam upaya membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045, yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki karakter yang baik. Selanjutnya ingin meletakkan platform pendidikan nasional yang menitikberatkan pada karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar program ini dapat berjalan, pemerintah berupaya merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter.

Hal yang menarik bahwa implementasi Pendidikan Karakter menurut amanat Peraturan Presiden tersebut dilaksanakan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan formal PPK harus terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, melalui pelajaran dan metode pembelajaran. Selain itu melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler antara lain melalui kegiatan keagamaan, seperti pesantren kilat dan ceramah agama.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan proyek besar, pekerjaan serius, yang perlu kerja keras dan kerja sama. Oleh sebab itu PPK dilaksanakan oleh tiga kementerian dan juga kepala daerah. Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Namun kelemahan Peraturan Presiden tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit keikutsertaan media masa. Padahal media masa sangat berperan ikut membentuk karakter peserta didik di luar jalur pendidikan formal.

Terlepas dari adanya sisi kelemahan, bahwa Peraturan Presiden perlu kita sambut dengan gembira. Kemudian selanjutnya diharapkan semua pihak ikut berkontribusi untuk melahirkan generasi terdidik yang memiliki karakter positif, dan mampu menghadapi tantangan global.